

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Amalia Nurjannah¹, Erika Revida*²

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara Medan, 20155 Indonesia

*Corresponding Author: erika@usu.ac.id

INFO PASAL

Article history:

Received 20 July 2024

Revised 23 July 2024

Accepted 26 July 2024

Available online:

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

E-ISSN: xxx

P-ISSN: xxx

How to cite:

Nurjannah, A., & Revida, E. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. SAJJANA: Public Administration Review, 2(1), 26-30.

ABSTRAK

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik swasta ataupun organisasi pemerintah dan menjadi salah satu fungsi utamanya yang harus dilakukan oleh pucuk pimpinan yang menjadi pemimpin organisasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menjelaskan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah desa sebagai dinamisor dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori peran oleh labolo (regulatif, dinamisor, fasilitator). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisor yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi belum mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Kelompok Tani.

ABSTRACT

The role of government is an absolute necessity in an organization, whether private or government organization, and is one of the main functions that must be carried out by the top leadership who is the leader of the organization. Based on this, researchers are encouraged to try to explain the role of the Village Government in Empowering Farmer Groups in Wonosari Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. This research aims to determine the role of the village government as a regulator in empowering farmer groups, the role of the village government as a dynamist in empowering farmer groups, and determine the role of the village government as a facilitator in empowering farmer groups in Wonosari Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out using interview techniques, observation, documentation and literature. Data were analyzed qualitatively using a role theory approach by Labolo (regulative, dynamist, facilitator). The research results show that the Government's role in Empowering Farmer Groups in Wonosari Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency has not been fully implemented optimally, this is seen from the aspect of the government



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

as a regulator (1) rules/mechanisms, (2) government policies are not completely good. The government as a dynamist is (1) Socialization, (2) Mentoring, (3) Training, and (4) Field visits. And the Government as a facilitator as a provider of superior seeds, fertilizer and production facilities has not been able to facilitate the farming community well.

Keyword: Role of Government, Village Government, Empowerment of Farmer Groups.

1. Latar Belakang

Pemerintah adalah pelaksana utama dalam negara yang mempunyai peran sangat penting demi berlangsungnya proses pembangunan baik Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan lainnya (Revida, dkk, 2023; Kato, dkk, 2021). Sebagaimana pemerintah dituntut untuk mampu menjadi penyelenggara Negara dalam mewujudkan perkembangan, kemajuan serta mampu menjadi faktor pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk melihat Tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat dilihat dari tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (Revida, dkk, 2022; Tanjung, dkk, 2022). Namun nyatanya petani di desa wonosari masih mengalami masalah pertanian yang disebabkan oleh pemerintah desa sendiri kurang dalam hal menangani pemberdayaan petani sehingga pemberdayaan kelompok tani tidak terlaksana dengan baik.

Kenyataan yang terjadi dilapangan disaat peneliti melakukan pra penelitian pada tanggal 22 februari 2024 tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi mengenai peran pemerintah dalam proses pemberdayaan kelompok tani Peranan pemerintah sebagai penyedia regulasi masih kurang massif hal itu dapat dilihat dari peran pemerintah sebagai penyedia regulasi dalam mendukung kesejahteraan petani (regulator) masih kurang dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petani sehingga masyarakat petani kurang memahami tentang aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Peran pemerintah sebagai dinamisator menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Desa Wonosari, bahwa pemerintah Desa Wonosari kurang aktif untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman, serta pemerintah desa masih tidak aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat.

Fakta lainnya peneliti menemukan bahwa pemerintah sebagai fasilitator tidak mampu menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh Kelompok Tani seperti yang terjadi di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, pada saat musim pengolahan lahan pertanian, kelompok tani sangat sulit mendapatkan pupuk subsidi bahkan ketersediaan pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas, belum lagi bibit yang di butuhan masyarakat ternyata tidak disediakan oleh pemerintah, masyarakat harus membeli sendiri, hal ini membuat tidak seimbangny antara jumlah petani yang membutuhkan bibit, pupuk dan saprodi lainnya dengan yang tersedia, serta alat-alat pertanian seperti traktor dalam memberdayakan masyarakat hampir dikatakan tidak ada ataupun tidak mencukupi dari kebutuhan masyarakat. Selain itu pengetahuan dan kemampuan masyarakat petani Desa Wonosari yang masih sangat rendah sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah dalam hal ini yaitu pembentukan kelompok tani, dari kelompok tani inilah nantinya masyarakat petani akan diberdayakan sehingga produktivitas akan lebih efektif dan efisien dan nantinya akan bekerja sama dengan Pemerintah Desa.

2. Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Menurut Sugiyono, (2017). Menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Data ini didapatkan melalui sumber data primer dan sekunder Sugiyono, (2017). Dimana data primer diperoleh dari survei, observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, dokumen resmi, basis data public, dan melalui media internet.

2.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Kantor Desa Wonosari yang beralamat di Jl. Turi, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Adapun alasan melakukan penelitian di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah karena lokasi penelitian ini sesuai dengan 29 karakter permasalahan yang peneliti angkat sehingga Kantor Kepala Desa diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian.

2.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong, L (2010) yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan juga tindakan, serta tambahan dari dokumen dan lain-lainnya. Sumber data sendiri merupakan suatu benda, hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Penelitian ini memperoleh sumber data melalui menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dapat membantu peneliti untuk memperoleh keterangan dan informasi dengan tujuan penelitian serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Selain itu teknik tersebut diharapkan dapat melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2.3 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana menentukan informan berdasarkan karakteristik dan kriteria tertentu. Teknik purposive sampling merupakan teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan dalam memperoleh data. Pemilihan informan ini melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Wonosari Wawancara mendalam
2. Sekertaris Desa Wonosari Wawancara mendalam
3. Ketua Kelompok Tani Wawancara mendalam
4. Anggota Kelompok Tani Wawancara mendalam
5. Penyuluh Pertanian Lapangan Wawancara mendalam
6. Masyarakat Wawancara mendalam

Alasan peneliti memilih informan tersebut dikarenakan jabatan-jabatan di atas memiliki hubungan, pengetahuan, dan informasi terkait Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2016) merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, artinya data diperoleh dari dokumen berupa jawaban atau keterangan bukan berupa angka-angka. Adapun data yang diperoleh meliputi:

1. Reduksi Data Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Seperti yang telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Proses reduksi ini sebaiknya dikerjakan sejak awal penelitian, karena jika hal tersebut ditunda-tunda maka akan menyulitkan penelitian. Sebab data akan semakin bertumpuk dan sulit untuk dikuasai dan disusun kembali.

2. Penyajian Data Setelah proses reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matriks, dan grafik. Dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul ke dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Setelah data yang masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya akhirnya didapatkan 34 kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas.

2.5 Teknik Kebahasaan Data

Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data sangat diperlukan karena data hasil penelitian harus valid, reliable, dan objektif. Menurut Zulfadrial (2021), keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

- 1) Triangulasi Sumber, triangulasi sumber merupakan triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dan data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga nantinya bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan, Sugiyono (2016).
- 2) Triangulasi Teknik, Untuk menguji kredibilitas data triangulasi teknik dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, Sugiyono (2016). Apabila pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan data yang berbeda maka dari itu peneliti dapat mendiskusikan kepada sumber yang bersangkutan lebih lanjut dengan tujuan untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar.
- 3) Triangulasi Waktu, Triangulasi waktu sendiri dianggap sering mempengaruhi kredibilitas data. Karena data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel dibanding wawancara yang dilakukan di siang atau menjelang sore di mana narasumber sudah melewati banyak pekerjaan, Sugiyono (2016).

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan (Revida & Purba, 2028).

1.1 Aturan/mekanisme dan kebijakan pemerintah kepada Masyarakat

Aturan atau mekanisme yang diciptakan pemerintah Desa merupakan sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh (Revida, Siahaan & Batu Bara, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan Suparman selaku Kepala Desa Wonosari mengatakan bahwa:

“Selaku dari pihak pemerintah Desa kami tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai kelompok tani sehingga kami hanya mengikut dari aturan umum yang berlaku, namun untuk aturan ada seperti penentuan SK Pola Tanam yang berkaitan dengan pola tanam “(hasil wawancara dengan Suparman Kepala Desa Wonosari, tanggal 08 Mei 2024).

Terkait dengan pernyataan yang di berikan oleh Kepala Desa yang di wawancarai bahwa mengenai aturan yang berlaku di Desa Wonosari khususnya tidak ada aturan atau perturan desa yang khusus untuk

menangani masalah tersebut sehingga aturan yang berlaku sesuai dengan pola umum yang di turunkan dari pemerintah daerah. Hampir sama apa yang disampaikan Tugimin selaku Ketua Kelompok Tani mengatakan bahwa:

“Aturan tentang pemberdayaan masyarakat petani khususnya di desa wonosari tidak diketahui dan tidak ada informasi dari Pemerintah Desa tentang aturan dasar yang diatur oleh pemerintah desa mengenai pemberdayaan kelompok tani sehingga pemerintah desa itu sendiri hanya memahami bahwa aturan yang digunakan di masyarakat adalah turunan dari pemerintah daerah”. (hasil wawancara dengan Tugimin selaku Ketua Kelompok, pada tanggal 18 juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mengenai aturan/mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani, peneliti menarik sebuah Kesimpulan jika yang terjadi di masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan jelas untuk menjadi pedoman bagi masyarakat untuk diberdayakan. Dari pihak pemerintah Desa sendiripun tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku dalam proses pemberdayaan masyarakat petani karena faktanya dari hasil wawancara dan observasi peneliti pemerintah Desa sendiri tidak memiliki aturan dasar secara khusus.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisor

Pemerintah sebagai dinamisor merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat (Revida, dkk, 2021; Abdul Rahman, dkk, 2021). Peran pemerintah sebagai dinamisor berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat.

2.1 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan dan menerjemahkan segala kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat (Sudarmanto, dkk, 2020). Pada dasarnya Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Wonosari dengan malakukan pertemuan dengan para anggota kelompok tani atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) untuk membahas mengenai masalah atau kendala yang di hadapi oleh masyarakat petani demi menemukan solusi dari permasalahan yang ada serta pemerintah memberikan pengarahannya dan membantu petani menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang di hadapai di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Suparman selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Kami pernah melakukan sosialisasi salah satunya yaitu sosialisasi pola tanam, sosialisasi biasanya kami ajukan kepada PPL untuk dilaksanakan apabila terdapat program dari pemerintah daerah untuk dilaksanakan di desa”, (hasil wawancara dengan Suparman selaku kepala desa pada tanggal 8 mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari Kepala Desa Wonosari bahwa dilaksanakan sosialisasi tingkat desa memberikan program untuk dilaksanakan di desa sehingga program itu kami limpahkan ke Penyuluh Pertanian Lapangan untuk dilaksanakan di desa dan itu berkerja sama dengan pemerintah desa. Selanjutnya hampir sama yang di sampaikan Juli sutoyo selaku Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi saya lakukan secara terjadwal karena saya dari pihak PPL hanya turun kelapangan melakukan sosialisasi apabila ada perintah dari Pemeirntah Desa dan apabila saya turun sosialisasi maka sekaligus juga membahas hal-hal yang menjadi masalah yang dihadapi para petani”, (hasil wawancara dengan juli sutoyo selaku PPL pada tanggal 13 Mei 2024).

Hasil wawancara dari Penyuluh Pertanian Lapangan mengatakan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan teratur dan terjadwal karena hanya menunggu arahan dan perintah dari pemerintah desa atau dalam dinas pertanian. Sama dengan hasil wawancara dan perbincangan yang dilakukan peneliti kepada tugimin selaku ketua kelompok tani bahwa:

“Saya dan teman-teman anggota kelompok tani di daerah sini sudah mendapatkan jadwal bergiliran setiap kelompok tani dari PPL untuk sosialisasi, dan PPL juga sangat baik dan antusias karena biasanya setiap seminggu sekali PPL datang untuk melihat bagaimana kelompok tani di sini.”, (wawancara dengan tugimin selaku ketua kelompok tani pada tanggal 8 mei 2024).

Dari hasil wawancara oleh ketua kelompok tani bahwa sosialisasi yang di dapat oleh PPL berjalan sesuai dengan perencanaan di awal-awal sehingga adanya sosialisasi yang berlangsung secara rutin dan terjadwal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari beberapa informan di atas mengenai sosialisasi bahwa sosialisasi yang di laksanakan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana sosialisasi dilaksanakan sewaktu- waktu dengan jadwal yang teratur sehingga masyarakat mudah untuk berkembang dan hasil yang di dapatkan dari sosialisasi tersebut berupa pemecahan masalah-masalah yang ada dalam kelompok tani. Masalah atau kendala dari masyarakat juga di atasi secara berkelanjutan di kegiatan sosialisasi pemerintah melalui PPL.

2.2 Pendampingan

Pendampingan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani adalah suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli di bidang pemberdayaan kelompok tani yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat dalam upaya untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada masyarakat kelompok tani untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Mastarida, dkk, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Suparman selaku Kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa:

“Kami dari pihak pemerintah desa menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk mendampingi masyarakat di kelompok tani apabila masyarakat menemukan kendala yang berkaitan dengan perkebunan mereka”, (hasil wawancara dengan suparman selaku kepala desa pada tanggal 08 mei 2024).

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pendampingan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan kelompok tani. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Tugimin selaku Ketua Kelompok Tani, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Saya dan anggota kelompok tani lain biasa menerima sosialisasi namun saya mengharapkan setelah di adakan sosialisasi tolong masyarakat kita dampingi agar materi yang di dapat pada sosialisasi dapat di jalankan di kebun bukan dibiarkan begitu saja”, (hasil wawancara dengan tugimin selaku ketua kelompok tani pada tanggal 08 mei 2024).

Dari hasil wawancara ketua kelompok tani menyatakan bahwa pendampingan sangat di butuhkan di masyarakat petani apabila telah dilaksanakan sosialisasi namun yang terjadi tidak demikian yang mana setelah dilakukan sosialisasi tindak lanjut pemerintah desa untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat sangat kurang bahkan tidak ada sehingga masyarakat menganggap bahwa sosialisasi hanya sekedar seminar untuk menyelesaikan program kerja pemerintah.

Sesuai dari hasil wawancara dan penjelasan diatas dari beberapa informan dapat di simpulkan bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat kurang bahkan sangat jarang dilakukan, meskipun dari pihak Dinas Pertanian kabupaten telah memberikan tugas kepada pelaksana PPL untuk rutin kelapangan mendampingi masyarakat namun karena jumlah sumber daya manusia yang tersedia sangat terbatas untuk mendampingi masyarakat kelompok tani sehingga pendampingan yang dilakukan tidak massif.

2.3 Pelatihan

Pelatihan merupakan serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat kelompok tani. Pelatihan pemberdayaan masyarakat juga merupakan instrumen yang secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Revida, Siahaan & Purba, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Suparman selaku kepala desa bahwa:

“Pihak pemerintah sendiri untuk masalah pelatihan kami berikan kepercayaan kepada PPL yang lebih mengetahui kondisi lapangan sehingga kami hanya menerima laporan mengenai apakah akan diadakan pelatihan atau tidak”, (hasil wawancara dengan suparman selaku kepala desa pada tanggal 08 mei 2024).

Dari pernyataan yang diberikan oleh kepala desa dapat dijelaskan bahwa dalam hal pelatihan pemerintah desa kurang aktif dalam memberikan pelatihan sehingga dia hanya melimpahkan kepada PPL. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Juli Sutoyo selaku Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Desa Wonosari, menyatakan bahwa:

“Saya biasanya mengadakan pelatihan kepada masyarakat kalau ada arahan saja, dan itupun perlu ada masalah yang dihadapi masyarakat tani, biasanya juga saya undang beberapa perwakilan kelompok tani untuk pelatihan di desa”, (hasil wawancara dengan juli sutoyo selaku PPL desa wonosari pada tanggal 13 mei 2024).

Dari penjelasan yang diberikan oleh Bapak Juli Sutoyo melalui wawancara diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan di masyarakat kelompok tani masih jauh dari harapan dilihat dari jumlah pelatihan yang di adakan oleh pemerintah yang sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan pengetahuan petani yang harusnya butuh banyak diadakan pelatihan. Namun nyatanya penjelasan diatas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tukirin selaku anggota masyarakat tani saat di wawancarai bahwa:

“Saya selaku anggota dari kelompok tani tidak tahu tentang kapan pelatihan, mau membahas apa, karena biasanya saya dapat kabar burung saja kalau pelatihan mau di lakukan di kantor desa,” (hasil wawancara dengan tukirin selaku masyarakat tani pada tanggal 13 mei 2024).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Tukirin selaku anggota kelompok tani dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah desa setempat kurang berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani ditinjau dari pernyataan kepala desa hanya sekedar mengetahui apabila akan diakan pelatihan di Desa setempat, Sehingga berdasarkan keterangan dari beberapa informan yang bersangkutan terkait dengan aspek pelatihan dapat disimpulkan bahwa pada aspek pelatihan pemerintah desa masih kurang aktif dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat dilihat dari pernyataan oleh beberapa informan. Kurang aktifnya pemerintah dalam hal memberikan pelatihan kepada masyarakat karena kurangnya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah desa dengan kelompok tani yang kemudian menjadikan pemerintah desa sendiri kurang dilibatkan dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat petani di daerahnya sendiri, sehingga pada aspek ini pemerintah dikatakan tidak berhasil dalam melaksanakan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani.

2.4 Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan merupakan kunjungan terencana dan terjadwal ke lokasi desa pemberdayaan. Dalam hal kunjungan lapangan yang bertujuan untuk mengamati masalah yang terjadi di lapangan serta menjadi ajang dalam pengawasan untuk terus mengawasi dan memperhatikan segala bentuk aktifitas masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut sehingga peneliti mewawancarai salah satu informan Suparman selaku Kepala Desa Wonosari bahwa:

“Selaku pihak pemerintah desa kami jarang melakukan kunjungan lapangan karena kami telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada PPL untuk secara rutin terjun kelapangan untuk melihat dan mengamati hal-hal yang terjadi di masyarakat, memberikan pemahaman dan masukan jika terdapat masalah yang di temui di masyarakat petani”, (hasil wawancara dengan suparman selaku kepala desa pada tanggal 08 mei 2024).

Dengan demikian dapat dijelaskan bawa dengan adanya wewenang yang diberikan kepada PPL oleh pihak dinas maka pemerintah desa itu sendiri kurang atau jarang melakukan kunjungan lapangan dengan alasan bahwa sudah dipercayakan kunjungan lapangan dilakukan secara rutin dan terjadwal oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sementara itu keterangan yang didapatkan dari Juli Sutoyo selaku PPL Desa Wonosari yang mengemukakan bahwa:

“Saya melakukan kunjungan lapangan dua kali dalam seminggu karena jam kerja saya hanya dua hari jadi dua harinya yaitu senin dan rabu saya gunakan untuk kerja di lapangan dan untuk laporan kantor jadi waktu libur saya gunakan untuk kerja laporan karena kondisi sumber daya yang membantu saya tidak ada”, (hasil wawancara dengan juli sutoyo selaku PPL pada tanggal 13 mei 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh informan diatas maka dapat diketahui bahwa kunjungan lapangan ke masyarakat untuk tugas pemberdayaan secara teknis sudah teratur dengan baik namun yang menjadi kendala besar karena jumlah PPL yang turun kelapangan hanya satu orang sementara jumlah kelompok tani dalam desa yang PPL bawahi lebih dari sepuluh kelompok tani padi. Sama halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Tugiman selaku ketua kelompok tani saat diwawancarai oleh peneliti yang

memaparkankan:

“Saya melihat petugas PPL turun kelapangan melihat kondisi masyarakat petani dalam satu minggu dua kali karena biasa di tunggu sama masyarakat kalau ada kendala yang mau di tanyakan sama pak tugimin, PPL sangat bekerja dengan baik” (hasil wawancara dengan tugiman selaku ketua kelompok tani pada tanggal 13 mei 2024).

Berkaitan dengan informasi yang disampaikan informan diatas sama halnya dengan yang di sampaikan oleh petugas PPL bahwa dari informan ketua kelompok tani sendiri memberikan keterangan jika kunjungan lapangan yang di lakukan oleh pemerintah sangat baik bahkan rentang waktunya baik yaitu seminggu dua kali sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa kunjungan lapangan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan jadwal oleh PPL. Dari hasil penjelasan dan beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yang berkaitan terkait dengan kunjungan lapangan dapat di pahami bahwa pada aspek ini dikatakan masih kurang baik karena melihat keterangan dari beberapa Informan yang menyampaikan bahwa pihak pemerintah masih kurang dalam hal melakukan kunjungan lapangan.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah (Napitupulu, dkk, 2020). Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitaas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan sarana dan prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya. Pemerintah juga menjadi penggerak dalam hal mendampingi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendaan dalam memberikan modal sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan.

3.1 Penyedia bibit unggul, pupuk dan sarana produksi lainnya

Pemerintah desa dalam hal memberikan fasilitas yaitu berupa bantuan kepada masyarakat petani seperti benih, pupuk dan sarana produksi lainnya di setiap anggota kelompok tani untuk di kelola dan di dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Suparman selaku Kepala Desa yang mangatakan bahwa:

“Biasanya bantuan kami berikan kemasyarakat berupa bibit, dan alat pertanian lainnya melalui anggaran APBDes yaitu 20% dari anggaran APBDes”, (hasil wawancara dengan suparman selaku kepala desa pada tanggal 08 Mei 2024).

Berdasarkan keterangan dari informan di atas maka dapat diketahui bahwa terkait penyaluran bibit, pupuk dan bantuan saran produksi lainnya di berikan kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) telah dilaksanakan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang di sampaikan Juli Sutoyo selaku PPL Desa Wonosari saat di wawancarai yang menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak PPL tidakk banyak memberikan bantuan, kalau alat-alat terkait pertanian pernah diberikan yaitu traktor namun itu dari pemerintah daerah bukan dari pemerintah desa. Tetapi pemerintah desa juga pernah memberikan bantuan berupa bibit gratis, kalau untuk pupuk tidak pernah,” (hasil wawancara dengan july sutoyo selaku PPL pada tanggal 08 mei 2024).

Hasil wawancara dari salah satu informan yang di temui oleh peneliti dapat di simpulkan bahwa bantuan yang diberikan kemasyarakat berjalan dengan efektif hanya saja bantuan yang di salurkan pemerintah desa hanya bibit saja, untuk pupuk itu dari pemerintah daerah yaitu pupuk subsidi, serta fasilitas lainnya seperti traktor juga dari pemerintah daerah.

Berdasarkan dari keterangan Tugimin selaku ketua kelompok tani saat diwawancarai oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

“Saya sebagai ketua kelompok tani itu tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari semenjak 10 tahun yang lalu. Baru tahun kemarin yaitu 2023 ada bantuan berupa bibit gratis. Kalau untuk pupuk itu dari pemerintah daerah sendiri yaitu pupuk subsidi”, (hasil wawancara dengan tugimin selaku ketua kelompok tani pada tanggal 08 mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti saat mewawancarai salah satu ketua kelompok tani dapat dipahami bahwa pada aspek ini pemerintah sebagai fasilitator hanya bekerja seadanya saja dapat

dilihat baik dilihat dari bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat petani yaitu berupa bibit gratis serta merata namun bantuan yang diberikan kadang tidak di indahkan serta tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sementara itu keterangan yang hampir sama juga di paparkan oleh Tukirin selaku anggota kelompok tani saat diwawancarai oleh peneliti yang menyampaikan bahwa:

“Saya sebagai anggota kelompok tani disini tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, baik berupa bibit, maupun fasilitas lainnya. Kalau untuk pupuk sendiri itu pupuk subsidi dari pemerintah daerah”, (hasil wawancara dengan tukirin selaku anggota kelompok tani pada tanggal 13 mei 2024).

Selanjutnya, hasil wawancara dan observasi peneliti saat mewawancarai salah satu anggota kelompok tani dapat jelaskan bahwa pada aspek ini pemerintah belum memberikan fasilitas kepada masyarakat petani. Berdasarkan dari beberapa keterangan informan yang telah di wawancarai oleh peneliti berkaitan dengan aspek penyediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya (fasilitator) maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selaku penyedia layanan bagi masyarakat belum mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik, dengan demikian masyarakat tani belum merasakan berbagai bentuk bantuan pemerintah yang diberikan tersebut juga secara keseluruhan sampai kepada masyarakat petani, meskipun ada beberapa bantuan yang secara kualitas bisa di katakan baik karena ada beberapa bantuan seperti bibit yang tak jarang kurang subur sampai kemasyarakat karena proses penyaluran pemerintah yang jauh dari pusat ke daerah sampai ke desa menjadi salah satu faktor sehingga bibit yang sampai ke masyarakat kurang subur lagi sementara pada saat belum disalurkan ke masyarakat petani bibit-bibit itu masih normal dan subur. Untuk fasilitas seperti pupuk pemerintah desa tidak menyediakan itu, hanya dari pemerintah daerah yaitu berupa pupuk subsidi, dan untuk sarana pra sarana tidak ada diberikan oleh pemerintah desa, hanya diberikan oleh pemerintah daerah.

Kesimpulan

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menggunakan 3 indikator yang dikemukakan labolo yaitu regulasi, Pada aspek Regulator khususnya mengenai aturan/ mekanisme serta kebijakan pemerintah tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan yang mengikat masyarakat untuk diberdayakan, yang artinya peran Pemerintah Desa dalam aspek regulator masih belum optimal, kedua yaitu dinamisator, pada aspek dinamisator yang kemudian didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan, keseluruhan subindikator tersebut mengarah ke arah negative yang artinya bahwa dari keterangan yang telah diperoleh peneliti saat menemui informan mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sangat jarang dilaksanakan, dan yang ketiga fasilitator dapat dilihat Pada aspek Fasilitator ketersediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah desa selaku penyedia layanan bagi masyarakat belum mampu memfasilitasi masyarakat petani dengan baik. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasannya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani belum optimal.

Referensi

- Abdul Rahman, S., Erika, R., Irwan Kurniawan, S., Robert Tua, S., Syofyan, S., Abdul Fauzal, H. H., ... & Ahmad, S. (2021). BUMDES: Menuju Optimalisasi EKonomi Desa.
- Kato, I., Faridi, A., Revida, E., Damanik, D., Siregar, R. T., Purba, S., ... & Weya, I. (2021). Manajemen Pembangunan Daerah. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E. S., & Simarmata, J. (2020). E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi. Yayasan Kita Menulis.
- Revida, E., Siahaan, A. Y., & Purba, S. (2018, March). The influence of social capital towards the quality of community tourism services in Lake Toba Parapat North Sumatera. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012087). IOP Publishing.
- Revida, E., Siahaan, A. Y. S., & Batubara, A. H. (2018). Development model of community tourism service quality based on social capital in Lake Toba North Sumatera.
- Revida, E., & Purba, S. (2018). Community participation based on social capital to enhance tourist visit at Lake Toba Parapat North Sumatera. In E3S Web of Conferences (Vol. 52, p. 00015). EDP Sciences.
- Revida, E., Purba, S., Kusumawati, I., Saragih, H., Zatira, D., Lisnawati, T., ... & Yudaningsih, N. (2021). Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi (Vol. 1). Penerbit Insania.
- Revida, E., Ismail, R., Lumbanraja, P., Trimurni, F., Sembiring, S. A. B., & Purba, S. (2022). the effectiveness of attractions in increasing the visits of Tourists in Samosir, North Sumatera. Journal of Environmental Management & Tourism, 13(8), 2240-2247.

- Revida, E., Ismail, R., Lumbanraja, P., Trimurni, F., Sembiring, S. A. B., & Purba, S. (2023). Village Owned Enterprises Governance (BUMDes) Based on the Tourism Village Development. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 18(10).
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Syafrizal, S., ... & Susilawaty, A. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, R., Yendrianof, D., Purba, S., Revida, E., Damayanti, W. K., Silalahi, M., ... & Sinambela, M. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik Era 4.0*. Medan: Yayasan Kita Menulis.